



The Habibie Center

Selasa, 7 Februari 2024

SIARAN PERS

Diskusi Publik Pasca Debat Capres dan Peluncuran Rekomendasi Kebijakan Habibie Democracy Forum 2023

Jakarta – Selasa, 6 Februari 2024 pukul 14.00-17.00 WIB, The Habibie Center menyelenggarakan Diskusi Publik Pasca Debat Capres bertajuk **“Review dan Proyeksi Pilpres 2024 serta Telaah atas Masa Depan Demokrasi Indonesia Pasca Pilpres 2024”** dan pemaparan Rekomendasi Kebijakan Habibie Democracy Forum, bertempat di Gedung The Habibie Center.

Diskusi publik ini dilaksanakan untuk memberikan analisis, review dan proyeksi elektabilitas capres 2024 pasca debat capres dan cawapres, serta memberikan telaah terhadap prospek dan arah demokrasi di Indonesia. Acara ini juga bertujuan untuk menyediakan ruang bagi masyarakat sipil untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai capres yang tepat untuk periode 2024-2029.

Acara diskusi publik ini diawali dengan pembukaan oleh **Dr.-Ing. Ilham A. Habibie, M.B.A.** selaku Ketua Dewan Pembina The Habibie Center. Narasumber dalam diskusi publik ini terdiri dari para pakar yang tergabung di dalam The Habibie Center, yang terdiri dari **Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar** (Ketua Dewan Pengurus), **Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D.** (Ketua Institut untuk Demokrasi, Ekonomi dan Ekologi), **Prof. Dr. Indria Samego, M.A.** (Dewan Pakar), **Umar Juoro, M.A., M.A.P.E.** (Dewan Pakar), **Dr. Ir. Rijal M. Idrus., M.Sc.** (Ketua Institut Benua Maritim), dan dimoderatori oleh **Mohammad Hasan Ansori, Ph.D** (Direktur Eksekutif).

Diskusi publik ini diawali dengan meninjau visi dan misi pasangan calon presiden terkait dengan isu penanganan iklim, net zero emissions, dan target transisi energi di Indonesia yang disampaikan oleh Bapak **Dr.-Ing. Ilham A. Habibie, M.B.A.** Secara umum visi dan misi para pasangan calon masih sangat makro dan implementasi rencana energi masih menjadi tanda tanya dan perlu perhatian pada rencana implementasi yang lebih spesifik. Meskipun kata kunci dalam isu ini sudah disebutkan di dalam visi misi, akan tetapi belum mengulas bagaimana partisipasi masyarakat, apakah sebagai konsumen atau produsen energi terbarukan. Selain itu Ia menambahkan, “Generasi milenial sangat sadar mengenai keperluan kita mempunyai satu rencana energi menuju energi

terbarukan dan *net zero*, kalau tidak kita perhatikan maka perubahan iklim yang meningkat drastis akan menjadi ancaman, karena Indonesia adalah negara kepulauan.”

Sementara itu Ketua Institut untuk Demokrasi, Ekonomi dan Ekologi, **Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D.** menanggapi visi dan misi calon presiden dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Secara umum, menurutnya siapapun yang terpilih menjadi presiden mendatang akan terkendala oleh APBN dalam mewujudkan berbagai program dalam visi misinya. APBN kita memang besar dan terus meningkat, tapi sesungguhnya rasio pajak kita sangat kecil, sehingga penerimaan negara masih terbatas. Dari sisi pengeluaran, APBN kita sudah habis untuk membayar hutang, transfer daerah, anggaran pendidikan, dan pos biaya lainnya. Ia juga berkomentar terkait hilirisasi yang mendapat kritik keras karena berjalan secara ugal-ugalan. Ia mengatakan, “Hilirisasi yang sekarang dijalankan itu bagus, tapi kritik yang disampaikan juga benar. Itu untuk memperbaiki, karena nilai tambahnya banyak ke Cina.”

Anggota Dewan Pakar The Habibie Center, **Umar Juoro, M.A., M.A.P.E.**, menambahkan target pertumbuhan ekonomi yang diusung pasangan calon 01 yang adalah 5.5-6.5%, pasangan 02 dan 03 menargetkan 7%, namun demikian para paslon tidak memberikan gambaran yang jelas terhadap implementasinya nanti. Meskipun dapat dipahami bahwa dalam kampanye politik, para kandidat berusaha memaksimalkan target namun dalam realisasinya akan sangat sulit mencapai 7%. Bagaimanapun kebijakan ekonomi juga terkait dengan politik demokrasi dimana ekonomi sangat dinamis dan kompleks. Lebih lanjut Ia mengatakan “Paling tidak aspek ekonomi yang menjadi tantangan kita terungkap dan kemudian didebatkan, nanti kita akan menerka-nerka siapa menterinya, programnya bagaimana, untuk kemudian bagaimana diterjemahkan dengan kebijakan dan berkaitan dengan hasil-hasil yang dicapai.”

Lebih lanjut Ketua Dewan Pengurus, **Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar** menanggapi perihal visi dan misi calon presiden terkait politik dan kebijakan luar negeri. Anies mendorong kebijakan luar negeri berbasis nilai-nilai (*value based foreign policy*), tidak sekedar transaksional dimana hal ini juga menjadi kritik tajam terhadap kekurangan politik indonesia sekarang. Sementara Prabowo menekankan *good neighbor policy* untuk stabilitas regional ASEAN. Ganjar dianggap sebagai “Jokowi 2.0” dengan lebih memanfaatkan Hubungan Internasional untuk kebutuhan domestik. Meskipun ada perbedaan di tingkat substansi, semua capres menekankan otonomi strategis dan menjalankan kebijakan luar negeri melalui *free and active policy* dan postur *non-alignment*. Ia menambahkan, “siapun presidennya, segi utama akan mengikuti koridor bebas aktif dan koridor kementerian luar negeri termasuk manfaat ekonomi, perlindungan ekonomi, peran indonesia di regional global akan sama, bedanya di gradasi.”

Sementara itu, **Prof. Dr. Indria Samego, M.A.** menyoroti visi dan misi dalam konteks politik dalam negeri. Meskipun visi misi capres sudah disampaikan secara luas, tingkat optimisme untuk perbaikan politik dalam negeri rendah, terutama karena janji partai politik yang dianggap tidak realistis. Pada debat capres terakhir masyarakat berharap intensitas debat meningkat, tetapi hasilnya dianggap antiklimaks. Lebih lanjut ia mengatakan “Perdebatan sudah berlalu, dan tinggal menunggu saja tanggal 14 Februari siapa yang akan terpilih. Diharapkan adanya kemajuan dari demokrasi dan juga yang paling utama adalah biaya dari demokrasi juga harus dipikirkan, sebagai salah satu pertanggung jawaban dari pasangan calon untuk mengedukasikan masyarakat mengenai prinsip2 demokrasi.”

Dalam diskusi publik ini juga menyoroti perihal persoalan lingkungan hidup yang diulas oleh Ketua Institut Benua Maritim, **Dr. Ir. Rijal M. Idrus., M.Sc.** Ia mengatakan “Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia saat ini adalah hal yang sangat tidak demokratis, terutama pada industri-industri ekstraksi seperti pertambangan, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah tidak diiringi oleh peningkatan kesejahteraan dan malah meningkatkan kemiskinan serta kerusakan alam. Contohnya Maluku Utara, tahun lalu pertumbuhannya ekonominya 27%, terbesar di dunia, tetapi kemiskinan dan kerusakan alam justru bertambah”. Meskipun konsep poros maritim dan tol laut sudah diajukan 10 tahun lalu, tercapainya visi menjadi negara maritim yang kuat menjadi penting, sehingga diperlukan perluasan riset mengenai kelautan di Indonesia dan perhatian terhadap masalah polusi laut. Dengan mengkombinasikan konsep benua maritim dari Prof. Habibie maka Indonesia akan menjadi negara maritim yang sangat baik di dunia.

Selain sesi diskusi, acara ini juga diisi dengan pemaparan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam Habibie Democracy Forum 2023, terutama yang terkait dengan Pemilu 2024. Berbagai rekomendasi yang dihasilkan merupakan buah pikiran dari para tokoh dan pakar dari berbagai pemangku kepentingan, dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak dalam menghadapi Pemilu 2024. Rekomendasi kebijakan tersebut dipaparkan oleh **Julia Novrita, Ph.D** (Direktur Program dan Pengembangan, The Habibie Center) dan **Danang Widoyoko** (Sekretaris Jenderal, Transparency International Indonesia, yang terangkum dalam tujuh poin berikut:

1. Memperkuat demokrasi melalui peran masyarakat sipil dalam memajukan nilai-nilai dan praktik demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 melalui penciptaan ruang partisipasi politik yang bermakna dengan mendorong kerjasama dan kolaborasi antar masyarakat sipil dalam penyampaian berbagai aspirasi serta penghargaan terhadap keberagaman Indonesia.
2. Memastikan penyelenggaraan PEMILU 2024 berjalan secara bebas dan adil, tanpa ada intervensi dan intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi.

3. Mendorong peran dan keterwakilan perempuan dalam politik melalui pengawalan dan penguatan regulasi dan mekanisme afirmasi, peningkatan kapasitas calon pemimpin/legislator perempuan, dan memberi akses dan ruang bagi mereka untuk terlibat dalam proses politik.
4. Meningkatkan literasi media dan edukasi politik masyarakat sipil melalui berbagai kegiatan yang bersifat partisipatif dan mendorong critical thinking sebagai upaya merawat dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi.
5. Melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan ancaman polarisasi dalam masyarakat, politik identitas, politik dinasti, manipulasi hukum, dan dominasi oligarki serta memastikan netralitas aparat negara terutama dalam penyelenggaraan PEMILU 2024.
6. Memaksimalkan peran BAWASLU, KPU, dan KPI dalam pengawasan, pemantauan, dan pemberitaan terkait PEMILU 2024 dan melibatkan Kepolisian dan PEMDA untuk mensosialisasikan peliputan media secara adil dan berimbang.
7. Memilih pemimpin negara yang berintegritas, yang merawat nilai-nilai demokrasi dan memberi keteladanan dalam proses transformasi Indonesia menuju ke arah yang lebih baik terutama dalam proses penegakan hukum, pemberantasan korupsi, perlindungan kebebasan pers dan masyarakat sipil, pembangunan ekonomi rakyat yang berkelanjutan, penguatan institusi dan kelembagaan yang menjadi pilar demokrasi.

Kontak:

Dewi Isma Rikya Ihsan

The Habibie Center

Jl.Kemang Selatan No.98 Jakarta 12560

Tel: (62-21) 7817211 Fax: (62-21) 7817212

Mobile: 0823-1483-8842

Email: dewi@habibiecenter.or.id